

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS

2.1 Tinjauan Pustaka

Bab ini menyajikan tinjauan pustaka yang menjadi dasar penyusunan kerangka pemikiran dan pengajuan hipotesis. Bagian pertama akan memaparkan tinjauan pustaka untuk menjelaskan konsep dasar dari variabel yang diteliti. Selanjutnya, akan dibahas penelitian-penelitian terdahulu yang relevan. Kemudian, bagian ini akan melanjutkan dengan membahas kerangka berpikir, yang menguraikan model serta hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat. Terakhir, akan disampaikan hipotesis yang diajukan berdasarkan tinjauan tersebut.

2.1.1 Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan suatu proses peningkatan kapasitas produksi barang dan jasa dalam wilayah geografis, umumnya negara, yang berlangsung dalam periode tertentu. Pertumbuhan ini mencerminkan kondisi dimana perekonomian suatu negara mengalami perubahan yang terus berjalan menuju arah yang lebih baik selama periode tertentu. Proses ini tercermin dalam peningkatan Produk Domestik Bruto (PDB) yang mengindikasikan nilai total barang dan jasa akhir yang dihasilkan. Adanya pertumbuhan ekonomi seringkali dianggap sebagai indikasi keberhasilan pembangunan ekonomi. Lebih lanjut, pertumbuhan ekonomi dapat bersumber dari permintaan agregat (AD) dan atau dari sisi penawaran agregat (AS). Dari aspek permintaan agregat, pertumbuhan ekonomi didorong oleh peningkatan permintaan dalam perekonomian. Sedangkan dari aspek

penawaran agregat, pertumbuhan ekonomi dilihat dari aspek produksi (Rambe & Febriani, 2020).

Pertumbuhan ekonomi secara sederhana dapat diartikan sebagai kenaikan output total dalam jangka panjang tanpa memandang apakah kenaikan tersebut diikuti oleh pertumbuhan struktur perekonomian atau tidak (Sukirno, 2004). Menurut Todaro dalam konteks negara, pertumbuhan ekonomi merefleksikan kemampuan atau kapasitas suatu negara untuk menyediakan barang dan jasa bagi penduduknya dalam jangka panjang (Khairul Amri, 2020). Menurut Dumairy (2006) menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi merupakan kenaikan produk domestik bruto tanpa melihat seberapa besarnya kenaikan tersebut apakah lebih besar atau lebih kecil dari pertumbuhan penduduk, serta tidak memandang apakah terjadi perubahan struktur ekonomi atau tidak. Pertumbuhan ekonomi yang pesat secara berkelanjutan memungkinkan negara industri maju memberikan kemakmuran bagi masyarakat. Pertumbuhan ekonomi dapat diartikan juga sebagai proses kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan nasional dan dapat diartikan juga sebagai keadaan kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan (Lesfandra, 2021).

2.1.1.1 Teori Pertumbuhan Ekonomi

1. Teori Pertumbuhan Ekonomi Klasik

Salah satu teori pertumbuhan ekonomi tertua yang sudah ada sejak abad ke-18 yaitu teori klasik. Tokoh terkemuka yang seringkali dikaitkan dengan teori ini adalah Adam Smith dan David Ricardo. Adam Smith mempunyai anggapan bahwa

perekonomian penduduk yang ada di dalam suatu negara akan bisa meraih titik tertinggi melalui sistem liberal. Sistem ini terdiri dari unsur utama, yaitu pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan output. Namun David Ricardo beranggapan bahwa pertumbuhan penduduk ini sebenarnya tidak memberikan pengaruh yang positif terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Sebaliknya, hal tersebut hanya akan membuat tenaga kerja produktif semakin bertambah banyak. Sehingga bisa berdampak ada penurunan upah pekerja.

Menurut pandangan ahli ekonomi klasik, terdapat empat faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi yaitu: jumlah penduduk, jumlah stok barang-barang modal, luas tanah dan kekayaan alam, dan teknologi yang digunakan. Ahli ekonomi klasik menitikberatkan perhatiannya kepada pengaruh pertambahan penduduk kepada pertumbuhan ekonomi. Teori ini menekankan tentang pentingnya faktor produksi dalam menaikkan pendapatan nasional dan mewujudkan pertumbuhan. Peranan tenaga kerja yang berlebihan menurut ahli ekonomi klasik akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi Sukirno (2012) dalam (Hanifah, 2022). Berikut adalah gambaran dari teori ekonomi klasik:

- 1) Pertumbuhan ekonomi tinggi: Ketika populasi masih relatif kecil, persediaan barang modal cukup melimpah, dan lahan masih tersedia dalam jumlah yang luas, pertumbuhan ekonomi akan relatif tinggi. Pada kondisi ini produktivitas per kapita meningkat karena lebih banyak sumber daya yang dapat diakses oleh setiap orang.
- 2) Keadaan Stasioner (*Stationery State*): Saat jumlah penduduk terus bertambah, sementara sumber daya dan kapasitas produktivitas individu

akan mulai menurun. Hal ini akan menyebabkan pertumbuhan ekonomi melambat, hingga akhirnya mencapai kondisi stasioner di mana tingkat kesejahteraan masyarakat dan aktivitas ekonomi tidak lagi mengalami peningkatan.

2. Teori Pertumbuhan Harrod-Domar

Menurut Elina (2023) teori pertumbuhan Harrod Domar menjelaskan teorinya pada tahun 1939 dalam jurnal ekonomi jurnal. Domar menyatakan teorinya pada tahun 1947 dari teori yang sama. Teori ini dikembangkan oleh Sir Roy F. Harrod dan Evsey Domar. Teori ini merupakan perkembangan dari teori Keynes. Dengan dasar pemikiran bahwa analisis yang dilakukan oleh Keynes dianggap kurang lengkap karena tidak membicarakan masalah-masalah ekonomi jangka panjang, Harrod-Domar mencoba untuk menganalisis syarat-syarat yang diperlukan agar perekonomian dapat tumbuh dan berkembang dalam jangka panjang dengan mantap (*steady growth*). Ada beberapa asumsi yang digunakan. Asumsi-asumsi tersebut antara lain:

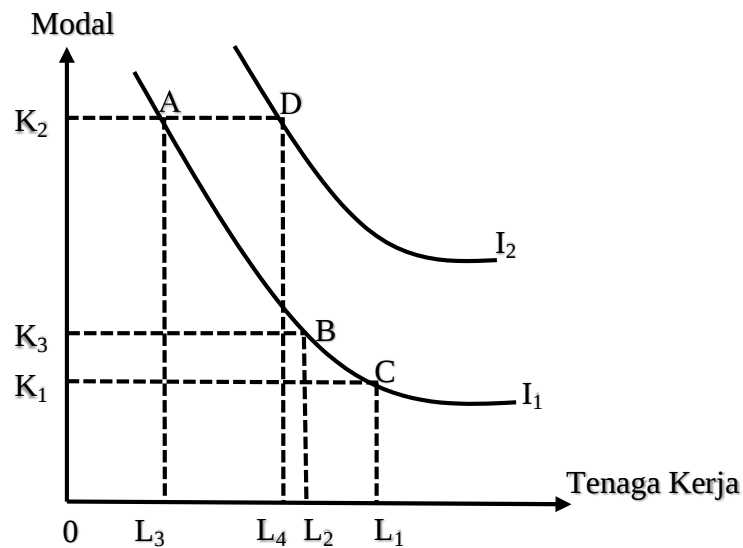
- Perekonomian dalam keadaan seluruh barang modal dan tenaga kerja telah seluruhnya digunakan (*full employment*).
- Perekonomian hanya terdiri dari dua sektor yaitu *household* dan *firm*. Tidak ada *government* dan *trade with rest of the world*.
- Besarnya *Private Saving Proporsional* dengan *National Income*.
- *Marginal Propensity to Save* (MPS), *Capital-output Ratio* (COR) dan *incremental capital-capital ratio* (ICOR) dianggap konstan/tetap.

Pola pendekatan Harrod terhadap proses pertumbuhan jelas menunjukkan ciri-ciri pokok pada kerangka analisis Keynes, baik dalam konseptualisasinya maupun perincian modelnya. Perhatian Keynes berkisar pada tingkat pendapatan yang stabil, berdasarkan kesempatan kerja secara penuh, termasuk penggunaan kapasitas produksi yang terpasang. Kini oleh Harrod dipersoalkan, dalam kondisi yang bagaimana dapat dicapai kestabilan pendapatan dan kesempatan kerja secara penuh dan yang dapat dipertahankan seterusnya dalam dinamika perkembangan ekonomi (perekonomian dalam perkembangan yang dinamis). Dengan kata lain, dalam kondisi yang bagaimana dan dengan persyaratan apa terdapat suatu proses pertumbuhan yang berlangsung dalam ekuilibrium yang stabil (*equilibrium of a steady advance*). Perhatian Harrod dipusatkan pada persyaratan yang harus dipenuhi untuk memelihara ekuilibrium antara tabungan dan investasi dalam perekonomian.

3. Teori Pertumbuhan Neo-Klasik

Menurut Kurniawan dan Hayati (2015), teori pertumbuhan ekonomi neo-klasik dikembangkan oleh Robert M. Solow (1956) dan T.W. Swan (1956). Model Solow Swan menggunakan unsur pertumbuhan penduduk, akumulasi kapital, kemajuan teknologi (eksogen), dan besarnya output yang saling berinteraksi. Perbedaan utama dengan model Harrod-Domar adalah masuknya unsur kemajuan teknologi. Selain itu, Solow-Swan menggunakan model fungsi produksi yang memungkinkan adanya substitusi antara kapital (K) dan tenaga kerja (L). Tingkat pertumbuhan berasal dari tiga sumber yaitu: akumulasi modal, bertambahnya penawaran tenaga kerja, dan kemajuan teknologi. Teknologi ini terlihat dari peningkatan skill atau

kemajuan teknik sehingga produktivitas meningkat. Sifat teori Neo-klasik bisa digambarkan sebagai berikut:



Sumber: Sadono Sukirno (1985)

Fungsi produksi ditunjukkan oleh I_1 , I_2 , dan seterusnya. Dalam fungsi produksi yang berbentuk demikian, suatu tingkat output tertentu dapat diciptakan dengan menggunakan berbagai kombinasi modal dan tenaga kerja. Misalnya untuk menciptakan output sebesar I_1 , kombinasi modal dan tenaga kerja yang dapat digunakan antara lain (a) K_3 dengan L_3 , (b) K_2 dengan L_2 , dan (c) K_1 dengan L_1 . Dengan demikian, walaupun jumlah modal berubah tetapi terdapat kemungkinan bahwa tingkat output tidak mengalami perubahan. Disamping itu, jumlah output dapat mengalami perubahan walaupun jumlah modal tetap. Misalnya walaupun jumlah modal tetap sebesar K_3 , jumlah output dapat diperbesar menjadi I_2 , jika tenaga kerja ditambah L_3 menjadi L_4 . (Arsyad, 2004: 62)

2.1.1.2 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi

Menurut Sukirno (2010: 213) pertumbuhan ekonomi suatu wilayah dipengaruhi oleh faktor ekonomi. Faktor ekonomi yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi meliputi Sumber Daya Alam, Sumber Daya Manusia, Modal, Teknologi dan sebagainya. Sukirno mengemukakan faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi:

1. Sumber Daya Alam

Sumber daya alam adalah faktor kunci yang mempengaruhi perkembangan ekonomi. Kekayaan alam suatu negara mencakup luas dan kesuburan tanah, kondisi iklim, jenis dan jumlah hasil hutan, serta kandungan mineral. Ketersediaan sumber daya alam yang melimpah memudahkan upaya pengembangan ekonomi, terutama pada tahap awal pertumbuhan. Sebaliknya, negara yang kekurangan sumber daya alam akan mengalami kesulitan dalam mempercepat pembangunan.

2. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia merupakan salah satu faktor krusial dalam pertumbuhan ekonomi. Namun, pertumbuhan ini tidak hanya ditentukan oleh jumlah sumber daya manusia, melainkan juga oleh kemampuan dan efektivitasnya. Aspek tenaga kerja mencakup jumlah dan keterampilan yang dimiliki. Para ekonom berpendapat bahwa kualitas tenaga kerja yang meliputi keterampilan, pengetahuan, dan disiplin adalah elemen paling penting dalam pertumbuhan ekonomi. Tanpa tenaga kerja yang terampil dan terlatih, barang-barang modal yang ada tidak akan dapat dimanfaatkan secara optimal. Peningkatan jumlah tenaga kerja dalam proses produksi dapat diukur melalui jumlah orang yang bekerja, jumlah hari kerja (*man*

days), atau jam kerja (*man hours*). Mungkin saja jumlah pekerja tetap, tetapi jumlah hari atau jam kerja mereka meningkat. Oleh karena itu, penting untuk memahami bahwa ketersediaan jam kerja dalam proses produksi dipengaruhi oleh kemauan dan kemampuan individu untuk bekerja. Teori ekonomi menunjukkan bahwa kemauan seseorang untuk bekerja dipengaruhi oleh tingkat upah yang ditawarkan; semakin tinggi upah, semakin besar kemauan untuk bekerja. Selain itu, kemampuan seseorang untuk bekerja juga dipengaruhi oleh kesehatan, kecakapan, keterampilan, dan keahliannya. Tingkat kecakapan dan keterampilan tersebut, pada gilirannya, dipengaruhi oleh pendidikan, baik formal maupun non-formal, seperti pelatihan kerja.

3. Modal

Modal adalah persediaan faktor produksi yang dapat diproduksi kembali secara fisik. Proses pembentukan modal atau akumulasi merupakan investasi dalam bentuk barang modal yang bertujuan untuk meningkatkan stok modal, output nasional, dan pendapatan nasional. Dengan demikian, pembentukan modal menjadi salah satu kunci dalam mencapai pertumbuhan ekonomi. Melalui berbagai cara, pembentukan modal dapat meningkatkan output nasional. Investasi dalam barang modal tidak hanya meningkatkan produksi, tetapi juga mendorong kemajuan teknologi.

4. Kemajuan Teknologi

Kemajuan teknologi merupakan faktor penting dalam pertumbuhan ekonomi. Dengan adanya kemajuan ini, berbagai penemuan baru dapat muncul, yang

berpotensi meningkatkan produktivitas pekerja, modal, dan faktor produksi lainnya.

Menurut Kuznet (2011: 26) “terdapat lima pola penting pertumbuhan teknologi di dalam pertumbuhan ekonomi modern. Kelima pola penyempurnaan tersebut meliputi: pengetahuan penemuan ilmiah atau teknik, investasi, inovasi, penyempurnaan dan penyebarluasan yang biasanya diikuti oleh penyempurnaan. Hal tersebut sejalan dengan yang diungkapkan oleh Schumpeter bahwa inovasi (pembaharuan) sebagai faktor teknologi yang penting dalam pertumbuhan ekonomi”.

2.1.2 Pajak

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang memiliki peran penting dalam menopang pembiayaan pembangunan dan menggambarkan kemandirian ekonomi. Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) diketahui pajak merupakan salah satu komponen Penerimaan Negara. Penerimaan pajak merupakan semua penerimaan yang terdiri dari pajak dalam negeri dan juga pajak atas perdagangan internasional. Penerimaan pajak ini dapat dikatakan sebagai sumber untuk mendanai pengeluaran belanja negara yang kedepannya diharapkan memiliki manfaat atau kontribusi yang baik agar tercapainya kemandirian dalam membiayai negara. Penerimaan pajak juga bisa diartikan sebagai pendapatan yang diperoleh oleh pemerintah atas pembayaran pajak dari masyarakat (Pratama & Widyastuti, 2018).

Menurut Waluyo (2017) Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh wajib pajak membayarnya menurut peraturan-

peraturan, dengan tidak mendapat potensi kembali, yang secara langsung ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintahan (Suryadi & Subardjo, 2019). Kemudian menurut Undang-Undang No.28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang No.6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan TataCara Perpajakan (KUP) bahwa Pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Febriana, 2017).

2.1.2.1 Fungsi Pajak

Menurut buku Perpajakan Indonesia yang ditulis oleh Waluyo (2011), terdapat dua fungsi pajak, yaitu:

1. Fungsi *Budgetair*

Pajak yang memiliki fungsi budgetair atau fungsi penerimaan berarti pajak sebagai sumber dana yang digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah. Contohnya adalah pajak dimasukkan sebagai penerimaan dalam negeri di struktur APBN.

2. Fungsi *Regulerend*

Pajak yang memiliki fungsi regulerend atau fungsi pengaturan berarti pajak adalah alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan di bidang sosial ekonomi. Contohnya adalah dikenakan pajak yang lebih tinggi terhadap minuman keras.

2.1.2.2 Sistem Pemungutan Pajak

Menurut Resmi (2019: 11) dalam memungut pajak dikenal beberapa sistem pemungutan, yaitu:

1. *Official Assessment System*

Sistem pemungutan pajak yang memberi kewenangan aparaturnya perpajakan untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada di tangan para aparaturnya perpajakan. Dengan demikian, berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak tergantung pada aparaturnya perpajakan (peranan dominan ada pada aparaturnya perpajakan).

2. *Self Assessment System*

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang Wajib Pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada di tangan Wajib Pajak. Wajib Pajak dianggap mampu menghitung pajak, memahami undang-undang perpajakan yang sedang berlaku, mempunyai kejujuran yang tinggi, dan menyadari akan arti pentingnya membayar pajak.

3. *Self Holding System*

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga yang ditunjuk untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib

Pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Penunjukan pihak ketiga ini dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan, keputusan presiden, dan peraturan lainnya untuk memotong serta memungut pajak, menyetor, dan mempertanggung jawabkan melalui sarana perpajakan yang tersedia. Berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak tergantung pada pihak ketiga yang ditunjuk. Peranan dominan ada pada pihak ketiga.

2.1.2.3 Hambatan Pemungutan Pajak

Menurut Mardiasmo (2018:10), hambatan terhadap pemungutan pajak dapat dikelompokkan menjadi:

1. Perlawanan Pasif

Masyarakat enggan (pasif) membayar pajak yang dapat disebabkan oleh:

- a. Perkembangan intelektual dan moral masyarakat
- b. Sistem perpajakan yang (mungkin) sulit dipahami oleh masyarakat
- c. Sistem kontrol tidak dapat dilakukan atau dilaksanakan dengan baik

2. Perlawanan Aktif

Perlawanan aktif meliputi semua usaha dan perbuatan yang dilakukan oleh

Wajib Pajak dengan tujuan untuk menghindari pajak. Bentuk antara lain:

- a. *tax avoidance*, usaha meringankan beban pajak dengan tidak melanggar undang-undang.
- b. *tax evasion*, usaha meringankan beban pajak dengan cara melanggar undang-undang (menggelapkan pajak).

2.1.2.4 Penggolongan Pajak

Pajak menurut Resmi (2013: 43) dapat dikelompokkan ke dalam golongan sebagai berikut:

1. Menurut sifatnya

- a. Pajak Subjektif, yaitu pajak yang memiliki hubungan erat dengan subjek pajak, di mana besarnya dipengaruhi oleh keadaan wajib pajak. Pajak ini disebut pajak langsung, karena dikenakan langsung kepada subjeknya. Prosesnya dimulai dengan menetapkan individu yang bersangkutan, lalu dilanjutkan dengan mencari syarat-syarat objektifnya.

Contohnya adalah Pajak Penghasilan.

- b. Pajak Objektif, yaitu pajak yang terkait dengan objek pajak, yang bisa berupa benda, keadaan, perbuatan, atau peristiwa yang memicu kewajiban pembayaran. Besarnya tidak tergantung pada keadaan wajib pajak. Pajak ini disebut pajak tidak langsung karena tidak dikenakan secara langsung kepada subjeknya. Proses dimulai dengan mengidentifikasi objek, seperti keadaan, peristiwa, atau perbuatan, kemudian baru dicari siapa yang harus membayar pajaknya.

Contoh: Pajak Pertambahan Nilai.

2. Menurut Pembebanannya

- a. Pajak Langsung yaitu pajak yang dibayar atau ditanggung langsung oleh wajib pajak itu sendiri. Pajak ini dipungut oleh pemerintah secara

langsung dari wajib pajak dan tidak dapat dialihkan kepada pihak lain, serta dipungut secara berkala (periodik).

- b. Pajak Tidak Langsung adalah pajak yang dipungut secara langsung ketika terjadi suatu peristiwa atau tindakan tertentu, seperti pengalihan barang tidak bergerak, pembuatan akta, dan sebagainya. Dalam pajak ini, wajib pajak dapat mengalihkan beban pajaknya kepada pihak lain, dan tidak memerlukan surat ketetapan pajak.

Contoh: PPN dan PPnBM, Bea Materai.

3. Menurut Kewenangannya

- a. Pajak Pusat, yaitu pajak yang pemungutannya dikelola oleh Pemerintah Pusat, dan hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran rutin negara serta pembangunan.

Contoh: PPh, PPN dan PPnBM, PBB, Bea Materai.

- b. Pajak Daerah, yaitu pajak yang pemungutannya dikelola oleh Pemerintah Daerah, baik itu Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten/Kota. Hasil dari pajak ini digunakan untuk membiayai pengeluaran rutin dan pembangunan daerah yang tercantum dalam APBD.

Contoh: Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Reklame, Pajak Kendaraan Bermotor.

2.1.3 Pengeluaran Pemerintah

Dalam perekonomian modern, terjadi perubahan signifikan terkait peran pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Peran pemerintah

dalam perekonomian mulai dipandang penting setelah Keynes memasukkan sektor pemerintah ke dalam analisis ekonomi makronya. Teori Keynes tentang pengeluaran pemerintah didasarkan pada gagasan bahwa pengangguran yang berkelanjutan disebabkan oleh penurunan aktivitas sektor swasta secara keseluruhan (Wahyudi, 2020). Menurut Sukirno (2000) Pengeluaran pemerintah yaitu suatu tindakan pemerintah untuk mengatur jalannya perekonomian dengan cara menentukan besarnya penerimaan dan pengeluaran pemerintah setiap tahunnya, yang tercermin dalam dokumen APBN untuk nasional dan APBD untuk daerah atau regional.

Pengeluaran pemerintah adalah Belanja Pemerintah Daerah yang manfaatnya berlangsung lebih dari satu tahun anggaran dan akan meningkatkan aset atau kekayaan daerah, serta akan menambah belanja rutin seperti biaya pemeliharaan dalam kelompok belanja administrasi umum (Halim, 2004). Pengeluaran pemerintah bertujuan untuk memperoleh aset tetap pemerintah daerah, seperti peralatan, bangunan, infrastruktur, dan aset tetap lainnya. Secara teori, ada tiga cara untuk mendapatkan aset tetap tersebut, yaitu dengan membangun sendiri, menukarnya dengan aset tetap lain, atau membelinya.

Menurut Ghozali (2008), kategori pengeluaran pemerintah adalah sebagai berikut:

1. Pengeluaran yang mengakibatkan perolehan aset tetap atau aset lainnya, sehingga menambah aset Pemda.
2. Pengeluaran tersebut melebihi batas minimal kapitalisasi aset tetap atau aset lainnya yang ditetapkan oleh Pemda.

3. Perolehan aset tetap dimaksudkan bukan untuk dijual. Pengeluaran pemerintah adalah pengeluaran yang dilakukan untuk membentuk modal, yang sifatnya menambah aset tetap/inventaris dan memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Ini juga mencakup pengeluaran untuk biaya pemeliharaan yang bertujuan mempertahankan atau meningkatkan masa manfaat, kapasitas, dan kualitas aset.

2.1.3.1 Teori Pengeluaran Pemerintah

1. Teori Adolf Wagner

Adolf Wagner berpendapat bahwa anggaran pengeluaran pemerintah cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Fenomena ini dikenal sebagai hukum yang menunjukkan semakin besarnya peran pemerintah. Inti dari teorinya adalah bahwa peran pemerintah dalam berbagai kegiatan dan kondisi ekonomi masyarakat secara keseluruhan semakin bertambah. Wagner menyatakan bahwa dalam suatu perekonomian, seiring dengan peningkatan pendapatan per kapita, pengeluaran pemerintah juga akan meningkat, terutama karena pemerintah perlu mengatur berbagai hubungan dalam masyarakat, serta menyediakan layanan di bidang hukum, pendidikan, rekreasi, dan kebudayaan.

Terkait dengan hukum Wagner, ada beberapa faktor yang menyebabkan pengeluaran pemerintah terus meningkat, antara lain peningkatan fungsi pertahanan, keamanan, dan ketertiban, peningkatan fungsi kesejahteraan, peningkatan peran perbankan, serta peningkatan fungsi pembangunan. Teori Wagner berlandaskan pada apa yang disebut *organic theory of state*, yaitu teori

yang menganggap pemerintah sebagai entitas yang dapat bertindak secara independen dari masyarakat lainnya.

2. Rostow dan Musgrave

Rostow dan Musgrave menghubungkan pengeluaran pemerintah dengan tahap-tahap pembangunan ekonomi. Pada tahap awal perkembangan ekonomi, rasio pengeluaran pemerintah terhadap pendapatan nasional relatif besar karena pada tahap awal pemerintah harus menyediakan sarana dan prasarana. Pada tahap menengah pembangunan ekonomi, investasi pemerintah tetap diperlukan guna memacu pertumbuhan agar dapat lepas landas. Bersamaan dengan itu porsi investasi swasta juga meningkat.

2.1.3.2 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pengeluaran Pemerintah

Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan peningkatan pengeluaran pemerintah dari tahun ke tahun. Menurut Sukirno (1984) dalam (Indrawati & Soebagiyo, 2006) besarnya pengeluaran pemerintah dipengaruhi oleh faktor-faktor yang bersifat ekonomi, serta faktor sosial dan politik.

- a. Faktor yang bersifat ekonomi berkaitan dengan tujuan mencapai penggunaan tenaga kerja secara maksimal tanpa menyebabkan inflasi, sehingga pertumbuhan dan perkembangan perekonomian dapat berlangsung dengan cepat.
- b. Faktor sosial dan politik adalah faktor yang paling banyak menyerap anggaran pengeluaran pemerintah, seperti penguatan pertahanan dan keamanan, bantuan sosial, bantuan untuk bencana alam, serta upaya menjaga kestabilan politik dan lain sebagainya.

Menurut Brownlee et al. (1960), terdapat empat alasan yang menyebabkan peningkatan pengeluaran pemerintah, yaitu:

- a. Kenaikan dalam "*general level of price*" berarti jika tidak ada perubahan dalam jumlah barang dan jasa, serta jika transfer *payment* yang dilakukan pemerintah diperkirakan akan menyebabkan peningkatan harga secara umum.
- b. Pertumbuhan jumlah penduduk dan pembukaan wilayah baru. Hal ini berkaitan dengan meningkatnya permintaan akan jasa pemerintah, kebutuhan pendidikan, pembangunan jalan raya, jembatan, fasilitas kesehatan, dan lain-lain.
- c. Peningkatan permintaan akan jasa pemerintah, seperti urbanisasi yang meningkat, kebutuhan akan air minum, listrik, dan fasilitas kesehatan, juga menjadi penyebab pembengkakan anggaran pengeluaran pemerintah.
- d. Perang dan keamanan merupakan faktor yang sangat penting untuk melindungi masyarakat dan negara dari ancaman, baik yang berasal dari dalam maupun luar. Biaya yang dikeluarkan pemerintah untuk membeli peralatan, membayar veteran, membayar utang perang, biaya pengobatan, dan lain-lain merupakan bagian terbesar dari anggaran pengeluaran ini.

2.1.4 Ekspor

Ekspor merupakan barang dan jasa yang diproduksi di suatu negara dan dijual kepada pembeli di negara lain, membentuk bagian dari perdagangan internasional. Ekspor sangat penting bagi ekonomi modern karena menyediakan lebih banyak pasar bagi masyarakat dan perusahaan untuk memasarkan produk

mereka. Salah satu fungsi utama diplomasi dan kebijakan luar negeri antara pemerintah adalah mendorong perdagangan ekonomi, termasuk ekspor dan impor, demi kepentingan semua pihak yang terlibat. Barang ekspor memberikan keuntungan bagi perekonomian suatu negara, yang pada gilirannya dapat memacu pertumbuhan ekonomi di negara tersebut Todaro dan Stephen (2006) dalam (Hodijah & Angelina, 2022).

Ekspor akan memberikan efek yang positif ke dalam kegiatan ekonomi negara, karena ia merupakan pengeluaran penduduk negara lain atas barang-barang yang dihasilkan dalam negeri. Pelaksanaan pembayaran ekspor dilakukan dengan cara tunai kredit, yang dapat dilaksanakan dengan cara: pembayaran dimuka (*advance payment*), *Letter of Credit* (L/C), *Wesel inkaso* (*collection draft*) dengan kondisi *against payment* dan *document against acceptance*, perhitungan kemudian (*open account*), konsinyasi, dan pembayaran lain yang lazim dalam perdagangan luar negeri sesuai dengan kesepakatan antara penjual dan pembeli (Sukirno, 2013).

Ekspor juga menjadi indikator prestasi dan keberhasilan suatu negara. Jika nilai ekspornya lebih tinggi daripada nilai impor, berarti kegiatan ekspor tersebut telah memberikan kontribusi positif terhadap pendapatan nasional. Peningkatan ekspor akan berdampak pada peningkatan pertumbuhan ekonomi (Fauzi & Suhaidi, 2022).

2.1.4.1 Jenis-Jenis Ekspor

Kegiatan ekspor dibagi menjadi dua jenis, yaitu (Putra, 2022):

1. Ekspor Langsung

Ekspor langsung adalah cara menjual barang atau jasa melalui perantara atau eksportir yang berada di negara lain atau negara tujuan ekspor. Penjualan dilakukan melalui distributor dan perwakilan penjualan perusahaan. Keuntungan dari metode ini adalah produksi tetap terpusat di negara asal dan kontrol atas distribusi lebih baik. Namun, kelemahannya meliputi biaya transportasi yang lebih tinggi untuk produk dengan volume besar serta adanya hambatan perdagangan dan proteksionisme.

2. Ekspor Tidak Langsung

Ekspor tidak langsung adalah teknik di mana barang dijual melalui perantara atau eksportir di negara asal, kemudian dijual kembali oleh perantara tersebut. Metode ini menggunakan perusahaan manajemen ekspor (export management companies) dan perusahaan perdagangan ekspor (export trading companies). Keuntungannya adalah sumber daya produksi tetap terkonsentrasi dan tidak perlu menangani ekspor secara langsung. Namun, kelemahannya meliputi kurangnya kontrol atas distribusi dan terbatasnya pengetahuan tentang operasi di negara lain. Biasanya, industri jasa lebih sering menggunakan ekspor langsung, sedangkan industri manufaktur menggunakan keduanya.

2.1.4.2 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Ekspor

Menurut Rangkuty dan Efendi (2022) faktor yang mempengaruhi ekspor suatu negara seperti:

1. Kebijakan Pemerintah Terhadap Perdagangan Luar Negeri

Ekspor akan meningkat apabila pemerintah memudahkan akses bagi para eksportir, seperti dengan pengurangan atau penghapusan biaya ekspor, penyediaan fasilitas produksi yang memadai, penyederhanaan prosedur ekspor, serta penyediaan sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan ekspor

2. Situasi Pasar di Dalam dan Luar Negeri

Keadaan pasar, baik domestik maupun internasional, juga mempengaruhi kegiatan ekspor. Tingkat permintaan dan penawaran dari berbagai negara berdampak pada harga di pasar global. Jika permintaan barang di pasar dunia lebih besar daripada jumlah barang yang tersedia, harga cenderung naik, yang pada akhirnya dapat mendorong para eksportir untuk meningkatkan volume ekspor mereka

3. Kemampuan Eksportir Memanfaatkan Peluang Pasar

Selain faktor eksternal, faktor dari dalam diri eksportir juga berperan penting dalam kegiatan ekspor. Eksportir harus cermat dalam mencari dan memanfaatkan peluang pasar yang ada, dengan mencari cara untuk memperluas jangkauan pemasaran. Oleh karena itu, eksportir perlu memiliki keterampilan di bidang pemasaran.

2.1.4.3 Komoditi Ekspor Indonesia

Sepuluh komoditas ekspor utama Indonesia meliputi tekstil dan produk tekstil (TPT), produk hasil hutan, elektronik, karet dan produk karet, kelapa sawit dan produk turunannya, otomotif, alas kaki, udang, kakao, serta kopi. Namun, karena persaingan di pasar internasional semakin ketat, komoditas ekspor utama

Indonesia telah terdiversifikasi dengan produk lain, seperti makanan olahan, perhiasan, ikan dan produk perikanan, kerajinan tangan, rempah-rempah, kulit dan produk kulit, peralatan medis, minyak atsiri, peralatan kantor, dan tanaman obat.

Secara umum, tujuan kegiatan ekspor adalah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat serta meningkatkan devisa negara demi mencapai kehidupan yang lebih sejahtera. Berikut adalah beberapa tujuan utama dari pelaksanaan kegiatan ekspor:

1. Membuka pasar baru di luar negeri atau memperluas jangkauan pemasaran produk dalam negeri.
2. Mendapatkan keuntungan dalam bentuk devisa.
3. Memperoleh harga jual yang lebih tinggi.
4. Menjaga stabilitas nilai tukar mata uang asing.
5. Mengatur harga produk ekspor di pasar domestik.

2.1.5 Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)

Penanaman Modal Dalam Negeri adalah salah satu kekayaan rakyat Indonesia yang dimiliki oleh negara atau swasta yang wilayah usahanya berada di Indonesia dan untuk keperluan pengelolaan suatu usaha (Fiorentina & Galuh, 2024). Penanaman Modal Dalam Negeri merupakan kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri. Ketentuan mengenai Penanaman Modal diatur di dalam Undang-undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Penanam modal dalam Negeri dapat dilakukan oleh perseorangan WNI, badan usaha Negeri, dan/atau pemerintah Negeri yang melakukan penanaman modal di wilayah negara Republik Indonesia.

Kegiatan usaha usaha atau jenis usaha terbuka bagi kegiatan penanaman modal, kecuali bidang usaha atau jenis usaha yang dinyatakan tertutup dan terbuka dengan persyaratan dan batasan kepemilikan modal Negeri atas bidang usaha perusahaan diatur di dalam Peraturan Presiden No. 36 Tahun 2010 Tentang Perubahan Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal. Sedangkan dalam Undang-undang No. 6 Tahun 1968 penanaman modal dalam negeri didefinisikan sebagai bagian dari kekayaan masyarakat indonesia, baik secara langsung maupun tidak langsung termasuk hak-hak dan benda-benda, baik yang dimiliki negara maupun swasta, yang disahkan guna menjalankan suatu untuk menurut ketentuan Undang-undang.

Istilah Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) berasal dari bahasa inggris, yaitu *domestic investment*. Penggunaan kekayaan secara langsung adalah penggunaan modal yang digunakan secara langsung oleh investor domestik untuk pengembangan usahanya, sedangkan penggunaan secara tidak langsung merupakan penggunaan modal yang digunakan tidak dilakukan secara langsung untuk membangun usaha. Pelaksanaan penanaman modal itu berdasarkan pada peraturan perundang- undangan yang berlaku. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang penanaman modal, penanaman modal dalam negeri adalah kegiatan menanamkan modal untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanaman modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri (Syaharani, 2011).

2.1.5.1 Latar Belakang Penanaman Modal Dalam Negeri

Penanaman Modal Dalam Negeri merupakan upaya untuk mendukung pertumbuhan dan stabilitas ekonomi nasional melalui investasi oleh pelaku usaha lokal. Menurut Daulay (2018) latar belakang dilakukannya PMDN antara lain:

1. Penyelenggaraan pembangunan ekonomi nasional adalah untuk mempertinggi kemakmuran rakyat, modal merupakan faktor yang sangat penting perlu diselenggarakan pemupukan dan pemanfaatan modal dalam negeri dengan cara rehabilitasi pembaharuan, perluasan, pembangunan dalam bidang produksi barang dan jasa.
2. Perlu diciptakan iklim yang baik, dan ditetapkan ketentuan-ketentuan yang mendorong investor dalam negeri untuk menanamkan modalnya di Indonesia.
3. Dibukanya bidang-bidang usaha yang diperuntukan bagi sektor swasta. Pembangunan ekonomi selayaknya disandarkan pada kemampuan rakyat Indonesia sendiri. Untuk memanfaatkan modal dalam negeri yang dimiliki oleh orang asing.

Bidang usaha yang dapat menjadi garapan PMDN adalah semua bidang usaha yang ada di Indonesia. Namun ada bidang-bidang yang perlu dipelopori oleh pemerintah dan wajib dilaksanakan oleh pemerintah. Misalnya yang berkaitan dengan rahasia dan pertahanan Negara. PMDN di luar bidang-bidang tersebut dapat diselenggarakan oleh swasta nasional. Misalnya perikanan, perkebunan, pertanian, telekomunikasi, jasa umum, perdagangan umum. PMDN dapat berupa sinergi

bisnis antara modal Negara dan modal swasta nasional. Misalnya di bidang telekomunikasi, perkebunan.

2.1.5.2 Tujuan Penyelenggaraan Penanaman Modal dalam Negeri

Dalam Undang-Undang No. 25 pasal 3 ayat 2 Tahun 2007, tujuan penyelenggaraan penanaman modal antara lain untuk :

1. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional .
2. Menciptakan lapangan kerja.
3. Meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan.
4. Meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha nasional.
5. Meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi nasional.
6. Mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan.
7. Mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan dana yang berasal, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri.
9. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

2.1.5.3 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi PMDN

Menurut Rowland (2014) Terdapat lima faktor yang mempengaruhi jumlah realisasi PMDN, antara lain:

1. Potensi dan karakteristik suatu daerah
2. Budaya masyarakat
3. Pemanfaatan era otonomi daerah secara proporsional
4. Peta politik daerah dan nasional

5. Kecermatan pemerintah daerah dalam menentukan kebijakan lokal dan peraturan daerah yang menciptakan iklim yang kondusif bagi dunia bisnis dan investasi

2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu digunakan untuk meninjau perkembangan topik yang sedang dikaji dan untuk menentukan posisi penelitian ini dalam rangka mendukung pembaruan ilmu pengetahuan. Penelitian sebelumnya yang dijadikan acuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No.	Judul Penelitian, Tahun	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian	Sumber Referensi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Pengaruh Ekspor, pajak, dan Nilai Tukar terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia Tahun 2012-2019. Yuliance Menggasa et al. 2022	Variabel Dependen: Pertumbuhan Ekonomi Variabel Independen: Ekspor, Pajak	Variabel Independen: Nilai Tukar	Variabel ekspor, pajak berpengaruh secara positif terhadap pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang atau jangka pendek di Indonesia.	Jurnal Equilibrium Volume 3, Nomor 3, Tahun 2022. Hal. 7-13
2.	Pengaruh Tingkat Pengangguran Dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di	Variabel Dependen: Pertumbuhan Ekonomi Variabel Independen: Pengeluaran Pemerintah	Variabel Independen: Tingkat Pengangguran	Variabel pengeluaran pemerintah mempunyai pengaruh signifikan secara negatif	Jurnal Ekonomi regional Unimal Volume 01 Nomor 01 April 2018.

No.	Judul Penelitian, Tahun	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian	Sumber Referensi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Kabupaten Aceh Utara Tahun 2007-2016. Devi Andriyani et al. 2018				E-ISSN : 2615-126X
3.	Pengaruh Pengeluaran Pemerintah, Investasi, Jumlah Penduduk, Kemiskinan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dan Ipm: Analisa Two Stage Least Square Untuk Kasus Indonesia. Yuli Wantri Simarmata et all. 2022	Variabel Dependen: Pertumbuhan Ekonomi Variabel Independen: Pengeluaran Pemerintah	Variabel Dependen: IPM Variabel Independen: Investasi, Jumlah Penduduk, Kemiskinan	Variabel pengeluaran pemerintah berpengaruh signifikan dan positif terhadap pertumbuhan ekonomi.	Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan JDEP Vol. 5 No. 1 (2022) hlm. 78-94
4.	Pengaruh Pengeluaran Pemerintah dan Jumlah Uang Beredar Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia. Riny Viri Insy Siniga et al. 2022	Variabel Dependen: Pertumbuhan Ekonomi Variabel Independen: Pengeluaran Pemerintah, Pajak	Variabel Independen: Jumlah Uang Beredar, Suku Bunga	Variabel pengeluaran pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, variabel pajak berpengaruh negatif dan signifikan	Jurnal Implementasi Ekonomi dan Bisnis. ISSN : 2089-6859. E-ISSN : 2809-3372

No.	Judul Penelitian, Tahun	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian	Sumber Referensi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
5.	Pengaruh PMDN, PMA, Pengeluaran Pemerintah dan Tenaga Kerja Terhadap Pertumbuhan Ekonomi. Risma et al. 2024	Variabel Dependen: Pertumbuhan Ekonomi Variabel Independen: Pengeluaran Pemerintah, PMDN	Variabel Independen: PMA, Pengeluaran Pemerintah	Variabel PMDN dan variabel Pengeluaran Pemerintah memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Jawa Tengah.	<i>Journal Of Development Economics And Social Studies</i> Volume 3 No 2 Tahun 2024
6.	Analisis Instrumen Kebijakan Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di 35 Kabupaten / Kota Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 – 2017. Fitri bahari & Nugroho SBM. 2019	Variabel Dependen: Pertumbuhan Ekonomi Variabel Independen: Pajak	Variabel Independen: Belanja pegawai, dan Belanja tidak langsung.	Variabel Pajak berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan.	Vol 17 No 1 (2019): Jurnal Litbang Provinsi Jawa Tengah
7.	Pengaruh Indeks Persepsi Korupsi, Pengeluaran Pemerintah Dan Penerimaan Pajak Terhadap Pertumbuhan Ekonomi ASEAN-5. Rino Bagus	Variabel Dependen: Pertumbuhan Ekonomi Variabel Independen: Pengeluaran Pemerintah, Pajak	Variabel Independen: Indeks Persepsi	Variabel Pengeluaran Pemerintah berpengaruh negatif dan signifikan, sedangkan variabel pajak tidak signifikan	Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB Vol. 1 No. 1

No.	Judul Penelitian, Tahun	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian	Sumber Referensi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Haryanto et al. 2013				
8.	Pengaruh Pajak, Penanaman Modal Dalam Negeri (Pmdn) Dan Tenaga Kerja Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia. Melni Yunita et al.	Variabel Dependen: Pertumbuhan Ekonomi Variabel Independen: Pajak	Variabel Independen: Penanaman Modal dalam Negeri (PMDN), Tenaga Kerja	Secara parsial pajak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia.	Jurnal Kajian Ekonomi dan Pembangunan. Vol 1, No 2 (2019)
9.	Efek Variabel Kebijakan Moneter Dan Fiskal Terhadap Inflasi, Pertumbuhan Ekonomi Dan Tingkat Pengangguran Di Indonesia. Jemi Juneldi et al. 2022	Variabel Dependen: Pertumbuhan Ekonomi Variabel Independen: Pengeluaran Pemerintah	Variabel Independen: Suku Bunga	Variabel pengeluaran pemerintah memiliki efek yang positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia dalam jangka panjang.	Jurnal Kajian Ekonomi dan Pembangunan. Volume 4, nomor 2, Juni 2022, hal 1-10
10.	Pengaruh Penanaman Modal Asing (PMA), Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), Dan Angkatan Kerja Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Jawa Tengah. Yoga	Variabel Dependen: Pertumbuhan Ekonomi Variabel Independen: PMDN	Variabel Independen: PMA, Tenaga Kerja	Variabel Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Jawa Tengah.	<i>Economics Development Analysis Journal</i> ISSN 2252-6560

No.	Judul Penelitian, Tahun	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian	Sumber Referensi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Krissawindaru Arta. 2013				
11.	Analisis Kebijakan Moneter dan Kebijakan Fiskal terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia tahun 2005-2018. Khusni Aristina, Whinarko Juliprijianto, Panji Kusuma Prasetyanto. 2020	Variabel Dependen: Pertumbuhan Ekonomi Variabel Independen: Pajak, Pengeluaran Pemerintah	Variabel Independen: Suku Bunga, Jumlah Uang Beredar.	Dalam jangka Panjang variabel penerimaan perpajakan, pengeluaran pemerintah memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia.	Vol. 2 No. 2 (2020): Dinamic : Directory Journal Of Economic
12.	Pengaruh Ekspor, Penanaman Modal Asing, Dan Penerimaan Pajak Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia. Lesfranda. 2021	Variabel Dependen: Pertumbuhan Ekonomi Variabel Independen: Ekspor, Penerimaan Pajak	Variabel Independen: Penanaman Modal Asing	Secara parsial, terdapat pengaruh positif dan signifikan ekspor terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Secara simultan, terdapat pengaruh positif dan signifikan ekspor, penerimaan pajak secara parsial terhadap pertumbuhan	JSEH (Jurnal Sosial Ekonomi dan Humaniora) Volume 7 Nomor 2 Desember 2021 (PP. 180-188)

No.	Judul Penelitian, Tahun	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian	Sumber Referensi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
				ekonomi Indonesia.	
13.	Analisis Pengaruh Kebijakan Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi: Studi Kasus Indonesia. Kevin M Sandryan. 2024	Variabel Dependen: Pertumbuhan Ekonomi Variabel Independen: Pengeluaran Pemerintah	Variabel Independen: Pendapatan Negara, Belanja Pemerintah	Di jangka panjang, pendapatan pajak berpengaruh negatif signifikan terhadap Gdp riil, Pengeluaran pemerintah juga berdampak positif terhadap Gdp riil.	Educationis t: Journal of Educational and Cultural Studies Vol. 3, No. 1, 2024, pp. 79-86 e-ISSN: 2964-4798
14.	Analisis Pengaruh PMA, PMDN dan Ekspor Migas-Non migas Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia. Danita Lusi et al. 2022	Variabel Dependen: Pertumbuhan Ekonomi Variabel Independen: PMDN	Variabel Independen: PMA, Ekspor Migas-Nonmigas	Variabel penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) berpengaruh signifikan pada jangka pendek dan jangka panjang terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia	Transekonomika: Akuntansi, Bisnis Dan Keuangan Volume 2 Issue 1 (2022)
15.	Analisis Pengaruh Ekspor, Pembentukan Modal, Dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia.	Variabel Dependen: Pertumbuhan Ekonomi Variabel Independen: Ekspor, Pengeluaran Pemerintah	Variabel Independen: Pembentukan Modal	Variabel ekspor baik dalam jangka panjang ataupun jangka pendek berpengaruh positif dan signifikan terhadap PDB, Pengeluaran pemerintah	Prosiding Seminar Nasional FE UNY. ISSN 978-602-72667-1-1

No.	Judul Penelitian, Tahun	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian	Sumber Referensi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Menik Fitriani Safari et al. 2016			dalam jangka panjang dan jangka pendek berpengaruh negatif dan signifikan terhadap PDB.	

2.3 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran adalah suatu konsep yang digunakan untuk mengungkapkan dan menentukan hubungan antara variabel yang akan diteliti serta teori-teori yang telah dibahas dalam tinjauan pustaka. Berdasarkan teori yang ada, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan antara penerimaan Pajak, Pengeluaran Pemerintah, Ekspor, dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia, yang akan dilakukan melalui analisis data sesuai dengan kerangka teori yang telah ditetapkan.

2.3.1 Hubungan Penerimaan Pajak dengan Pertumbuhan Ekonomi

Pajak merupakan sumber utama pendapatan negara yang berasal dari kontribusi masyarakat, baik individu maupun badan usaha. Besar kecilnya pajak ditentukan oleh kemampuan ekonomi, nilai objek pajak, dan aturan yang berlaku. Pajak ini berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi karena pajak yang diterima oleh negara masuk ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), yang kemudian disalurkan ke berbagai pengeluaran. Pengeluaran ini terbagi menjadi dua jenis, yaitu pengeluaran rutin dan belanja modal. Dari sisi belanja,

yang paling berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi adalah belanja pembangunan. Belanja pembangunan mencakup pembiayaan untuk fasilitas publik seperti infrastruktur (jalan, jembatan, rumah sakit, dan sekolah) serta bantuan atau subsidi untuk masyarakat. Subsidi ini dapat membantu mempertahankan atau bahkan meningkatkan daya beli masyarakat, yang pada gilirannya dapat mendorong konsumsi dan aktivitas ekonomi. Meskipun pajak mengurangi pendapatan yang dapat dibelanjakan, program ini membantu kelompok yang membutuhkan. Dengan cara ini, pengeluaran negara, terutama untuk pembangunan, dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi dengan menciptakan lapangan kerja, meningkatkan produktivitas, dan memperbaiki kualitas hidup masyarakat.

Pajak memainkan peran penting dalam menciptakan lapangan kerja, meningkatkan produktivitas, dan memperbaiki kualitas hidup masyarakat. Dana dari pajak memungkinkan pemerintah membangun infrastruktur, pendidikan, dan layanan kesehatan, yang membuka peluang kerja baru. Selain itu, pajak mendukung investasi dan sektor ekonomi strategis melalui subsidi dan insentif, yang mendorong pertumbuhan ekonomi. Dengan pengelolaan pajak yang baik, kualitas hidup masyarakat pun dapat meningkat, terutama dalam hal akses pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial.

Selain itu, insentif pajak mendukung inovasi, investasi, dan pengembangan usaha domestik. Efek multiplier dari pengelolaan pajak meningkatkan konsumsi, produksi, dan pertumbuhan ekonomi. Pajak juga berfungsi mengurangi ketimpangan melalui redistribusi pendapatan, menjadikannya pendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Melni Yunita dan Sri Ulfa (2019) melakukan penelitian untuk menguji pengaruh pajak terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia, dan memperoleh hasil bahwa pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Signifikannya pengaruh pajak terhadap pertumbuhan ekonomi mengindikasikan bahwa naik turunnya pertumbuhan ekonomi ditentukan oleh penerimaan pajak. Semakin tinggi penerimaan pajak maka semakin tinggi pula pertumbuhan ekonomi dan sebaliknya. Hal serupa dilakukan juga oleh Rinaldy Syahputra (2017) dan memperoleh hasil yang serupa.

2.3.2 Hubungan Pengeluaran Pemerintah dengan Pertumbuhan Ekonomi

Pengeluaran yang dilakukan pemerintah akan mempengaruhi berbagai sektor dalam perekonomian. Adanya pengeluaran pemerintah secara langsung atau tidak langsung berpengaruh terhadap sektor produksi barang dan jasa. Pengeluaran pemerintah untuk pengadaan barang dan jasa akan berpengaruh secara langsung terhadap produksi barang dan jasa yang dibutuhkan pemerintah. Pengeluaran pemerintah untuk sektor pendidikan akan berpengaruh secara tidak langsung terhadap perekonomian, karena pendidikan akan menghasilkan SDM yang lebih berkualitas dan pada akhirnya akan meningkatkan produksi dan mendorong pertumbuhan ekonomi (Iskandar, 2016).

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Mutia Sari (2016) yang menyatakan bahwa pengeluaran pemerintah memiliki hubungan yang positif dengan pertumbuhan ekonomi. Hal ini juga sesuai dengan teori yang dikatakan oleh Keynes, pengeluaran pemerintah akan berdampak terhadap ekonomi dalam negeri. Hasil penelitian ini juga sejalan dengan dengan penelitian yang dilakukan oleh Yuli

dan Deden (2022) yang mengatakan bahwa pengeluaran pemerintah memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

2.3.3 Hubungan Ekspor dengan Pertumbuhan Ekonomi

Ekspor merupakan salah satu perdagangan internasional yang harus dilakukan negara karena berkontribusi langsung pada peningkatan pendapatan negara, devisa, dan aktivitas produksi. Ketika suatu negara meningkatkan eksportnya, permintaan atas barang dan jasa domestik di pasar internasional meningkat, mendorong dunia usaha untuk memperluas kapasitas produksi. Hal ini menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, dan merangsang konsumsi domestik.

Selain itu, pendapatan dari ekspor memperkuat cadangan devisa negara, yang digunakan untuk membiayai impor barang modal atau bahan baku yang mendukung pembangunan ekonomi. Ekspor juga mendorong daya saing produk lokal di pasar global, yang memacu inovasi dan efisiensi dalam dunia usaha. Dengan demikian, ekspor berfungsi sebagai penggerak utama pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan pendapatan, produksi, dan daya saing internasional.

Yuliance et al (2022) melakukan penelitian mengenai pengaruh ekspor terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia yang menyatakan bahwa ekspor berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang atau pendek di Indonesia. Seiring meningkatnya ekspor maka semakin tinggi juga pertumbuhan ekonomi yang akan diterima oleh suatu negara (di Indonesia). Penelitian serupa juga dilakukan oleh Lesfranda (2021) yang

menyatakan bahwa secara parsial, terdapat pengaruh positif dan signifikan ekspor terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia.

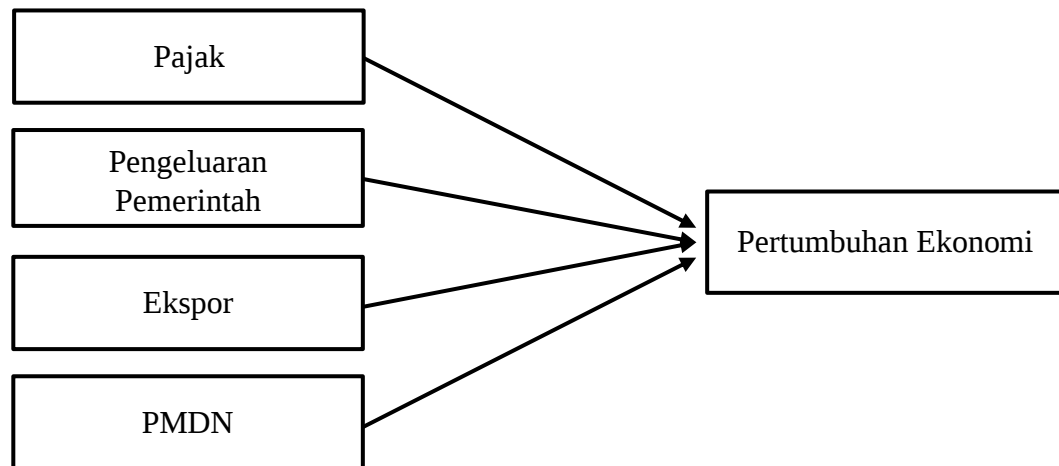
2.3.4 Hubungan PMDN dengan Pertumbuhan Ekonomi

Investasi disini ialah bahwa masyarakat tidak menggunakan semua pendapatannya untuk dikonsumsi, melainkan ada sebagian yang ditabung dan tabungan ini diperlukan untuk pembentukan investasi. Selanjutnya pembentukan investasi ini telah dipandang sebagai salah satu faktor bahkan faktor utama di dalam pembangunan ekonomi. Misalkan, investasi dalam peralatan modal atau pembentukan modal adalah tidak hanya meningkatkan produksi atau pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dapat memberikan kesempatan kerja bagi masyarakat. Dengan demikian terdapat hubungan yang positif antara pembentukan investasi dengan pertumbuhan ekonomi pada suatu negara Prasetyo (2009) dalam (Wihda & Poerwono, 2017).

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Hana (2021) yang menyatakan bahwa PMDN memiliki pengaruh positif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di ASEAN. Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) merupakan sumber dana atau modal yang berasal dari dalam negeri untuk membantu pembangunan proyek-proyek di dalam negeri sehingga akan membantu proses pertumbuhan ekonomi di dalam negara tersebut. Penelitian serupa dilakukan oleh Risma Fahrel et al (2024) menyatakan bahwa PMDN memiliki pengaruh yang positif terhadap pertumbuhan ekonomi.

Untuk memudahkan penulis dalam melaksanakan penelitian, kerangka berpikir disusun untuk menjelaskan pengaruh pajak, pengeluaran pemerintah, ekspor dan

penanaman modal dalam negeri (PMDN) terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Berikut ini adalah gambaran skematis dari kerangka pemikiran tersebut:



Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran

2.4 Hipotesis

Berdasarkan rumusan masalah dan kajian pustaka di atas, hipotesis dapat dirumuskan. Hipotesis adalah jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, di mana masalah tersebut telah disajikan dalam bentuk pertanyaan. Berdasarkan permasalahan yang diangkat, tujuan penelitian, serta kajian pustaka yang telah dijelaskan, maka hipotesis penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Diduga secara parsial pajak, pengeluaran pemerintah, ekspor, dan penanaman modal dalam negeri (PMDN) memiliki pengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia tahun 2009-2023.

2. Diduga secara bersama pajak, pengeluaran pemerintah, ekspor, dan penanaman modal dalam negeri (PMDN) berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia tahun 2009-2023.